



MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN SPASIAL UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN PADA KELURAHAN PARINGIN KOTA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

Lysa Yulianti¹, Siti Raudah², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: Lysayulianti99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dan Spasial Untuk Perencanaan Pembangunan Yang Berkelanjutan Pada Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil secara *purposive sampling* yang berjumlah 13 orang. Manajemen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Spasial untuk Pembangunan yang Berkelanjutan Pada Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan cukup baik dilihat dari: *Pertama*, Perencanaan, Tujuan cukup baik, Anggaran memadai karena dalam perencanaan anggaran telah dilakukan Konsultasi dan koordinasi. *Kedua*, Pengorganisasian, Pembentukan Tim sudah baik dan Pembagian kerja sudah baik *Ketiga*, Pengarahan, pengarahan perencanaan sudah cukup baik, karena sudah ada koordinasi antar dengan bidang/lembaga, pelaksanaan kegiatan tim sudah cukup baik dengan sistem pengumpulan usulan dilakukan berjenjang. *Keempat*, Pengkoordinasian, koordinasi kegiatan cukup baik dengan melakukan musyawarah rutin dan kerjasama cukup baik. *Kelima*, Pengawasan, monitoring cukup baik. Evaluasi cukup baik terhadap progres pembangunan. Faktor pendukung : adanya dukungan adopsi/replikasi tentang Manajemen perencanaan pembangunan. Faktor penghambat yaitu keterbatasan SDM dan tidak berkoordinasinya Pihak ketiga pelaksana Kegiatan Pembanguna.

Kata Kunci : Manajemen, Perencanaan Pembangunan, Kebutuhan Masyarakat dan Spasial

ABSTRACT

This study aims to determine the Management of Community Needs-Based Development Planning and Spatial for Sustainable Development Planning in Paringin Kota Village, Paringin District, Balangan Regency and the factors that influence it. This study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. Data collection techniques used are interviews, observations and documentation. Data sources were taken by purposive sampling totaling 13 people. Management of Community Needs-Based Development Planning and Spatial for Sustainable Development in Paringin Kota Village, Paringin District, Balangan Regency is quite good seen from: First, Planning, Objectives are quite good, Budget is adequate because in budget planning consultation and coordination have been carried out. Second, Organization, Team Formation is good and Division of work is good Third, Direction, planning direction is good enough, because there is coordination between fields/institutions, implementation of team activities is good enough with a system of collecting proposals carried out in stages. Fourth, Coordination, coordination of activities is good enough by conducting routine deliberations and cooperation is good enough. Fifth, Supervision, monitoring is good enough. Evaluation is quite good for development progress. Supporting factors: the existence of support for adoption/replication of development planning management. Inhibiting factors are limited human resources and the lack of coordination of third parties implementing development activities.

Keywords: Management, Development Planning, Community Needs and Spatial

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan

dan selaras dengan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten. Selain itu hendaknya juga dilakukan secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing serta memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut dokumen perencanaan awal dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD yang dalam pelaksanaannya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tidak adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan mengakibatkan proses pelaksanaannya tidak akan berjalan baik dan tanpa tujuan yang jelas, karena strategi kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah masih jauh dari kebutuhan maupun keinginan serta kepentingan masyarakatnya. Hilangnya keikutsertaan masyarakat ini dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan rakyat terhadap pemangku kepentingan hingga menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam sistem pemerintahan, keikutsertaan masyarakat merupakan faktor utama guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) agar penerapan dan peningkatan sistem pertanggungjawaban pada penyelenggaraan pemerintahan dapat tepat sasaran, nyata, jelas dan berhasil serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan perolehan, pengelolaan, dan penggunaan data secara tepat waktu dan tepat, sehingga dapat menyesuaikan solusi dengan prioritas pembangunan daerah. Pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah Indonesia Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah menyatakan, “Untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membentuk lembaga informasi perencanaan pembangunan daerah.” Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kemajuan menuju sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang lebih komprehensif. Untuk mewujudkan suatu perencanaan yang ideal pada masa otonomi daerah, maka diupayakan penerapan pemerintahan yang sering disebut dengan e-Government. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk mencapai proses perencanaan yang ideal, pemerintah harus mampu menerapkan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini harus didukung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 391, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah (termasuk informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi terpadu. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengolahan data spasial meliputi pemetaan dan analisis data spasial, pengembangan model dan simulasi penggunaan lahan, evaluasi dampak, serta implementasi dan pemantauan. Pemetaan dan analisis data spasial menjadi hal penting dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan yang berkelanjutan (Budiyono & Aditya, 2022). Selain itu, pengembangan model dan simulasi penggunaan lahan, evaluasi dampak, serta implementasi dan pemantauan juga menjadi hal penting dalam perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu juga menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan penggunaan lahan yang telah diambil keputusan (Milasari et al., 2023). Dalam hal ini, pengolahan data spasial dapat membantu dalam

memastikan bahwa penggunaan lahan yang berkelanjutan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Pembangunan di Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin, masih belum maksimal, disebabkan oleh beberapa alasan seperti :

1. Belum terinventarisnya data kebutuhan Pembangunan Fisik dan Non Fisik secara menyeluruh seperti pembangunan jalan pemukiman, Jalan usaha tani, bronjung, drainase, irigasi, PJU dan fasilitas umum lainnya.
2. Belum tersedianya data perencanaan Pembangunan baik fisik maupun non fisik seperti pembangunan jalan pemukiman, Jalan Usaha Tani, bronjung, drainase, irigasi, PJU dan fasilitas umum lainnya.
3. Seringnya *rolling* atau pindah tugas ASN di Kelurahan sehingga perencanaan pembangunan tersebut sering berubah-ubah dan tidak tepat sasaran.
4. Keterbatasan Masyarakat untuk menyampaikan atau mengajukan permintaan pembangunan seperti musrembang yang diwakili oleh ketua RT yang mana hasilnya tidak disampaikan kembali kepada masyarakat.

Manajemen

Manajemen adalah sebagai organisasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dan mempunyai serta untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna serta efektif dan efisien. Kegiatan manajemen sendiri melibatkan banyak elemen organisasi baik sarana, prasarana, internal, eksternal maupun fungsi kedudukan dalam organisasi untuk menacapai tujuan organisasi.

Robbins dan Coulter (1999) menyebutkan manajemen adalah proses pengkoordinasian kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Pengkoordinasian orang lain artinya melibatkan orang lain, sedangkan efektif dan efisien untuk menunjukkan berdaya guna dan berhasil guna. Pengkoordinasian orang lain tidak berarti kegiatan tidak dapat dilakukan sendiri, hanya saja dalam pertimbangan efektivitas dan efisiensi, perlu pelibatan orang lain. Lalu dapat tercapai secara optimal pelibatan tersebut, perlu dikelola atau ada proses atau upaya pengkoordinasian yang disebut manajemen.

George R. Terry dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011:3), juga menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama- sama usaha orang lain.

Manajemen Publik

Keban (2014:100) memberikan pendapat bahwa Manajemen Publik adalah suatu spesialisasi yang lumayan baru, tetapi berakar dari pendekatan normatif. Perspektif pertama adalah perspektif klasik yang berkembang sejak tulisan Woodrow Wilson di tahun 1887 yang berjudul "*The study of Administration*". Gagasan pertamanya menyangkut pemisahan politik dan administrasi. Administrasi publik tidak secara aktif terlibat dalam pembentukan kebijakan karena tugas utamanya adalah implementasi kebijakan dan menyediakan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, administrasi publik diharapkan untuk netral dan profesional. Administrasi publik diawasi oleh dan bertanggungjawab kepada pejabat politik yang dipilih (Denhardt & Denhardt, 2000).

Wilson dan Keban (2004:100) membagi 4 (empat) prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang dipakai oleh manajemen publik sampai saat ini yaitu:

- a. Pemerintah sebagai *setting* utama organisasi
- b. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama
- c. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, dan
- d. Metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan bidang administrasi publik.

Keban juga menyebutkan bahwa, manajemen publik adalah suatu studi *interdisipliner* dari aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan sebuah kinerja kompleks dari aktornya yaitu pemerintah dan seluruh pegawainya untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya dan publik merasa terpenuhi semua keinginannya dengan profesionalitas kerja atau pengaturan dari dalam organisasi publik itu sendiri. Pengaturannya dalam melayani konsumen yang berupa masyarakat sehingga harus memperhatikan manajemen semua aspek yang menjadi penunjang kinerja organisasi.

Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah sebagai elemen-elemen dasar yang mengikat dalam proses manajemen yang dijadikan patokan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Henry Fayol dalam (Suardi, 2018: 8-10) menyebutkan ada 5 (lima) fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan, sering pula fungsi manajemen disebut sebagai unsur-unsur manajemen. Untuk penjelasan lebih terperinci, kelima pokok fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah upaya memikirkan apa yang harus dilakukan dengan semua sumber daya yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Manajer mengevaluasi berbagai alternatif rencana sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan adalah sebuah proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi lain tidak dapat berjalan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian memudahkan manajer untuk mengawasi dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan menentukan tugas-tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut, dan pada tingkat apa keputusan harus dibuat.

3. Pengarahan (*Directing*)

Dalam mengarahkan kegiatan, setiap orang dalam organisasi diajak atau dibujuk untuk berkontribusi pada organisasi melalui kerjasama dalam mencapai tujuan. Arahan memberikan petunjuk atau memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilakukan sehingga manajer harus memotivasi staf dan personel organisasi untuk secara sukarela melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang akan dibuat.

4. Pengkoordinasian (*Coordinating*)

Koordinasi dipahami sebagai upaya untuk menyesuaikan bagian-bagian yang berbeda sehingga kegiatan bagian-bagian tersebut selesai tepat waktu dan dapat memberikan kontribusi usahanya secara maksimal untuk mencapai keseluruhan tugas. Karena bagaimanapun untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi pada awalnya dibuat struktur organisasi, pekerjaan dibagi, hubungan wewenang dan tanggung jawab ditentukan.

5. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses mengamati atau memantau pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai.

Perencanaan Pembangunan

Definisi dasar dari sebuah perencanaan yang mana diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Tjokroamidjojo, 1984), sama halnya dengan definisi dari perencanaan pembangunan.

Pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Siagian (1983) dalam bukunya yang berjudul “*Administrasi Pembangunan*” mengemukakan, pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tampak oleh mata. Pembangunan fisik berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat dan biasanya memiliki jangka waktu yang lama. Contoh pembangunan non fisik adalah pemberdayaan masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan.

Secara rinci, menurut Tjokroamidjojo (1984) perencanaan pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (steady economic growth)
- 2) Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita
- 3) Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi
- 4) Perluasan kesempatan kerja
- 5) Usaha pemerataan pembangunan
- 6) Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan
- 7) Kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan sosial
- 8) Terdapatnya usaha secara terus menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi
- 9) Ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang

fundamental/ideal atau yang bersifat jangka panjang. Jika disimpulkan, maka sesuai dengan ciri-ciri yang telah diuraikan di atas, perencanaan pembangunan harus dilakukan sebagaimana mestinya agar memperoleh hasil yang baik. Sumber daya yang ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Perencanaan juga berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mendorong dan menjadikan pembangunan dengan perspektif jangka panjang.

Tahap Perencanaan Pembangunan melewati beberapa tahapan untuk mencapai hasil yang terbaik. Adapun menurut Tjokroamidjojo (1984) tahap-tahap dalam proses perencanaan adalah:

- 1) Penyusunan Rencana Penyusunan rencana terdiri dari unsur-unsur:
 - a) Tinjauan keadaan. Berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana (*review before take off*) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*). Kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi, seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai, hambatan-hambatan yang masih ada, dan potensi-potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan.
 - b) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (*forecasting*). Diperlukan data-data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan.
 - c) Penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara- cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, begitu memainkan peranan yang sangat penting dalam penetapan dan pencapaian tujuan agar memperoleh hasil yang terbaik.
 - d) Tahap persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan memiliki tingkatan dari keputusan di bidang teknis kemudian mengarah ke proses politik.
- 2) Penyusunan Program Kerja Melakukan perumusan lebih rinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antara lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Seringkali program kegiatan dan pembiayaan yang konkrit daripada program-program atau proyek-proyek pembangunan tersebut dalam project form. Bahkan ini menjadi alat rencana, alat pembiayaan, alat pelaksanaan dan alat evaluasi rencana yang penting.
- 3) Pelaksana Rencana Hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan tahap operasi. Perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan berbeda-beda. Tahap pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan.
- 4) Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Tujuan dari pengawasan adalah:
 - a) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya.
 - b) Apabila terdapat penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan penyebabnya.

Menurut Bryson (2005) dalam modul perencanaan strategis, berpendapat perencanaan strategis pada umumnya menggunakan konsep stakeholder untuk menyeleksi berbagai isu berkaitan dengan pemilihan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan strategis: waktunya, alasannya, dan caranya. Perencanaan strategis adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan merubah perusahaan, sehingga apabila perencanaan strategis tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan.

Perencanaan strategis sejauh ini difokuskan pada organisasi yang bertujuan meraih laba seperti organisasi bisnis. Namun seiring berjalannya waktu, perencanaan strategis juga dapat digunakan pada organisasi publik. Menurut Bryson (2005) secara khusus perencanaan strategis

dapat diterapkan kepada:

- 1) Lembaga publik, Departemen, atau Divisi penting dalam organisasi.
- 2) Pemerintahan Umum, seperti Pemerintahan Kota, Negara, atau Negara Bagian.
- 3) Organisasi nirlaba yang pada dasarnya memberikan pelayanan.
- 4) Fungsi khusus yang menjembatani batasan-batasan organisasi dan Pemerintah, seperti transportasi, kesehatan, atau pendidikan.
- 5) Seluruh komunitas, kawasan Perkotaan atau Metropolitan, Daerah, atau Negara Bagian, memperbaiki kinerja organisasi dan sebagainya.
- 6) Secara keseluruhan, Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis adalah suatu proses sistematis untuk mengelola organisasi di masa yang akan datang. Selain itu, erat hubungannya dengan lingkungan serta menggunakan konsep stakeholder untuk menyeleksi isu berkaitan dengan pemilihan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan strategis. Setiap organisasi bisa menggunakan perencanaan ini karena pada dasarnya perencanaan strategis mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang dinamis.

METODE

Sesuai Judul yang di angkat oleh Peneliti yaitu Manajemen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Spasial untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan Pada Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, maka penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor Kelurahan Paringin Kota yang beralamat di Jl. Bahagia RT. 10 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan kode pos 71662. Waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis mulai dari bulan November 2024 hingga Bulan Maret 2025.

Pendekatan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9), “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositive*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Sesuai dengan metode penelitian maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan logika berfikir induktif, yaitu konsep- konsep yang telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka tidak diuji kebenarannya melainkan digunakan sebagai kerangka dan sengaja dianggap kajian. Menggunakan logika berfikir induktif berarti pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu sesuai pendekatan dengan cara mengamati, menyelidiki, guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa, dengan tidak memerlukan pengukuran yang dilakukan secara tepat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil secara *purposive sampling* yang berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan uji kredibilitas perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan *membercheck*.

PEMBAHASAN

A. Manajemen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Spasial untuk Pembangunan yang Berkelanjutan Pada Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan

Untuk mengetahui sejauh mana proses perencanaan dalam manajemen perencanaan telah

berjalan di Kelurahan Paringin Kota, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis temukan dilapangan, dan dilengkapi dengan hasil analisis untuk memberikan penjelasan terhadap penelitian tersebut, dimana untuk pembahasan pertama dimulai dari point berikut ini:

1. Perencanaan

Pengertian perencanaan (*planning*) dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya.

a. Tujuan

Tujuan cukup baik karena untuk menyajikan data dan informasi spasial yang lengkap dan akurat yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan menjadi bahan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembangunan fisik maupun non fisik di Kelurahan Paringin Kota. Menyajikan Perencanaan Pembangunan Fisik berbasis spasial Kelurahan Paringin Kota melalui musyawarah dengan masyarakat 18 RT dan konsultasi dengan stakeholder terkait seperti Konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Konsultasi dengan Bappedalitbang, Konsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Konsultasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

b. Anggaran

Pihak Kelurahan sudah merancang semaksimal mungkin terkait pengelolaan anggaran dan apa saja yang ingin ditingkatkan dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat dari RT 1 sampai RT 18, LPM dan karang taruna, Konsultasi serta koordinasi dengan stakeholder eksternal, Camat, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Paringin. Konsultasi serta koordinasi dengan Stakeholder Eksternal Sekretaris Daerah, Bappedalitbang, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, PUPRKIM, DINSOSPPAPEMDES, dan DISKOMINFO. Berdasarkan hasil observasi mengenai anggaran Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan pada Kelurahan Paringin Kota di ajukan ke Pemerintah Daerah tentunya, dan untuk tahun 2024 itu sudah disetujui dan di keluarkan dana khususnya untuk pembangunan yang ada di Kelurahan Paringin Kota. Sehingga perencanaan Anggaran sudah baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Paringin Kota dengan melakukan Konsultasi dengan stakeholder terkait serta berkoordinasi dengan lembaga lain dan melakukan musyawarah dengan masyarakat dari RT 1 sampai RT 18, LPM dan karang taruna.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusiadan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi, meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.

a. Pembentukan Tim

Pembagian kerja sudah baik dengan membentuk tim yang terdiri dari Mentor yang bertugas untuk mendukung dan membantu Project Leader dalam melaksanakan Manajemen perencanaan pembangunan, serta memastikan tim melaksanakan tugas-tugasnya. Project Leader yang bertugas Menetapkan sasaran perubahan dan Menggerakkan Stakeholder dalam pelaksanaan Manajemen perencanaan pembangunan serta Tim Teknis yang bertugas

Mengumpulkan bahan dan mengolah data. Berdasarkan hasil observasi telah dibentuk tim yang terdiri dari pihak kecamatan, pihak kelurahan dan melibatkan masyarakat Paringin Kota sebelum kita melangkah dalam melakukan pembangunan infrastruktur tentunya berdasarkan ada usulan, musyawarah dulu ditingkat RT/RW, Lembaga kalurahan, masyarakat, dan pelaku usaha kemudian di sampaikan ke pemerintah kalurahan yang menjadi prioritas. Berdasarkan dokumentasi Pembentukan tim Untuk mengetahui hubungan stakeholder internal dan eksternal rencana Manajemen perencanaan pembangunan. Pembentukan Tim sudah baik baik karena sudah ada koordinasi antar bidang/lembaga lain yang membantu dalam pengembangan Kelurahan Paringin Kota melalui pendekatan peran dari seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan Manajemen perencanaan pembangunan ini, yaitu Mentor/ Sekretaris Kecamatan, Action Leader/ Lurah Paringin Kota Kecamatan Paringin, Coach/Widyaiswara pada BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Stakeholder dan Tim Efektif.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja sudah baik dengan pembagian dari Mentor yang bertugas untuk mendukung dan membantu Project Leader dalam melaksanakan Manajemen perencanaan pembangunan, serta memastikan tim melaksanakan tugas-tugasnya. *Project Leader* yang bertugas Menetapkan sasaran perubahan dan Menggerakkan Stakeholder dalam pelaksanaan Manajemen perencanaan pembangunan serta Tim Teknis yang bertugas Mengumpulkan bahan dan mengolah data.

3. Pengarahan

Yang dimaksud dengan fungsi pengarahan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para manajer seperti menginstruksi, membimbing dan mengawasi kinerja pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan juga dianggap sebagai jantung dari proses manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan menjadi tidak penting jika fungsi pengarahan tidak terlaksana. Manajer harus bisa menjalankan fungsi pengarahan dengan sebaik mungkin karena ini merupakan salah satu fungsi manajer juga, bahkan menjadi fungsi manajer yang paling penting.

a. Pengarahan perencanaan

Pengarahan cukup baik karena Lurah Paringin Kota telah menjalankan fungsi Pengarahan terhadap bawahannya, hal ini tentunya sangat penting mengingat lurah adalah pimpinan dalam kelurahan, dan apabila menginginkan keberhasilan dalam proses pembangunan terhadap program yang dijalankan, maka diperlukan koordinasi kepada bawahannya, dan juga pengarahan sistem kerja yang jelas agar nantinya bawahannya tidak melakukan kesalahan disaat bekerja. Berdasarkan hasil observasi tata hubungan dalam Manajemen perencanaan pembangunan telah di matangkan dengan pembentukan tim agar tugas-tugas yang menjadi kewajiban para anggota organisasi dapat dijalankan dan diselesaikan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan berpedoman pada perencanaan (*planning*) yang sudah ditetapkan. Disimpulkan bahwa pengarahan perencanaan sudah cukup baik, karena sudah ada koordinasi antar bidang/lembaga lain yang membantu dalam pengembangan Kelurahan Paringin Kota melalui pendekatan peran dari seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan Manajemen perencanaan pembangunan ini.

b. Pelaksanaan Kegiatan Tim

Pelaksanaan kegiatan tim sudah cukup baik dengan sistem pengumpulan usulan dilakukan berjenjang Proses pengumpulan usulan dimulai dengan surat edaran dari pemerintah kelurahan yang disalurkan kepada ketua RT, serta organisasi masyarakat terkait.

Kemudian, ketua RT mengadakan pertemuan rutin dengan warga untuk mendiskusikan dan mengumpulkan usulan yang ada. Peran RT dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dan Sistem Perwakilan dalam Pengumpulan Usulan. Rembug RT menjadi forum utama bagi warga untuk mengajukan usulan, baik yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun non-fisik. Para ketua RT berfungsi sebagai penghubung yang menyerap aspirasi warga dan menyaring mana yang sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana Kelurahan.

4. Pengkoordinasian

Koordinasi dipahami sebagai upaya untuk menyesuaikan bagian- bagian yang berbeda sehingga kegiatan bagian-bagian tersebut selesai tepat waktu dan dapat memberikan kontribusi usahanya secara maksimal untuk mencapai keseluruhan tugas. Karena bagaimanapun untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi pada awalnya dibuat struktur organisasi, pekerjaan dibagi, hubungan wewenang dan tanggung jawab ditentukan.

a. Koordinasi

Koordinasi kegiatan cukup baik dimulai dengan musyawarah dengan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan di mana kepentingan masyarakat dapat diakomodasi dan dipertimbangkan dengan baik. Pada Musrembang 2024 diperoleh putusan bahwa akan diusulkan pembangunan pembangunan jalan pemukiman, Jalan Usaha Tani, bronjung, drainase, irigasi, PJU dan fasilitas umum lainnya. Berdasarkan observasi penyatuan tujuan dengan kegiatan dapat dilihat dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik dan non fisik, serta perencanaan pembangunan tersebut telah direalisasikan di tahun anggaran 2024. Disimpulkan bahwa koordinasi kegiatan cukup baik dengan melakukan musyawarah rutin dengan tim dan dengan masyarakat 18 RT dalam proses perencanaan dan pembangunan di mana kepentingan masyarakat dapat diakomodasi dan dipertimbangkan dengan baik.

b. Kerjasama

Kerjasama cukup baik pemerintah kelurahan melakukan Kerjasama dengan pihak dari Kecamatan Paringin, dan Dinas-dinas terkait perencanaan dan pembangunan di mana kepentingan masyarakat. Sehingga inventarisasi data kebutuhan pembangunan fisik dan non fisik secara menyeluruh seperti pembangunan jalan pemukiman, Jalan usaha tani, bronjung, drainase, irigasi, PJU dan fasilitas umum lainnya

5. Pengawasan

Pengawasan adalah proses mengamati atau memantau pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai.

a. Monitoring

Monitoring telah dilakukan pihak kelurahan langsung terhadap proses pembangunan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengecek tingkat kemajuan, penyelesaian dan memeriksa biaya yang digunakan. Serta sudah adanya yang bertugas dalam mengawasi pembangunan jalan yaitu kepala lingkungan setempat, sehingga pengawasan barang, material dan pembayaran upah terkontrol dan sistematis.

b. Evaluasi

Evaluasi cukup baik dengan Evaluasi untuk mengetahui sejauh mana capaian dari kegiatan. Mengevaluasi sasaran Tujuan, Mengevaluasi Fungsi Kegiatan Pembuatan laporan akhir kegiatan Manajemen perencanaan pembangunan, Kegiatan Pembuatan laporan akhir

kegiatan Manajemen perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil observasi sudah ada identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kelurahan dan mengevaluasi potensi yang dapat dikembangkan. Hal ini dapat melibatkan diskusi terkait kondisi lingkungan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan bekal bahan yang dikumpulkan pada setiap tahapan, maka Penyusunan Laporan Manajemen perencanaan pembangunan bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Berdasarkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi disimpulkan evaluasi cukup baik dengan melakukan pertanggungjawaban terhadap progres pembangunan. Kegiatan pertanggungjawaban dengan Penyusunan Laporan Manajemen perencanaan pembangunan.

(1) **Faktor pendukung**

a. Penerapan Strategi Komunikasi

Diperlukan komunikasi yang baik dengan Pemangku Kepentingan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Media Sosial dalam hal ini WhatsApp. Dengan WhatsApp inilah seluruh Tahapan Manajemen perencanaan pembangunan disampaikan kepada Pemangku Kepentingan. Yang menjadi alasan kenapa Media Sosial WhatsApp yang dipilih, hal ini dikarenakan telah tersedianya Group WhatsApp khusus Pemangku Kepentingan.

Intensnya komunikasi dengan Pemangku Kepentingan melalui Media Sosial WhatsApp ini, diharapkan Pemangku Kepentingan bisa mendapatkan informasi terkait Perkembangan Manajemen perencanaan pembangunan, sehingga mereka semakin tertarik untuk berpartisipasi dalam Manajemen perencanaan pembangunan ini.

b. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Manajemen perencanaan pembangunan

Keberadaan Kegiatan Manajemen Perencanaan Pembangunan ini yang dibuat disambut baik, sehingga kegiatan tersebut telah memperoleh berbagai apresiasi baik secara internal oleh Camat Paringin maupun dari pihak internal lainnya, selain itu juga dari pihak eksternal terutama SKPD yang terkait langsung dengan aski perubahan yang dibuat, hal ini ditunjukkan dari pernyataan dukungan terhadap Manajemen perencanaan pembangunan yang dibuat.

(2) **Faktor Penghambat**

a. Faktor Keterbatasan SDM

Terbatasnya SDM dari Kelurahan, sehingga mempengaruhi pada terhambatnya waktu Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Spasial untuk Pembangunan yang Berkelanjutan Pada Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Berdasarkan observasi kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik dan non fisik, menjadi hambatan perencanaan pembangunan tersebut telah direalisasikan di tahun anggaran 2024. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terbatasnya SDM dari Kelurahan, sehingga mempengaruhi pada terhambatnya waktu Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Spasial untuk Pembangunan yang Berkelanjutan Pada Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

b. Faktor Pihak Ketiga

Anggaran Perubahan tahun 2024, ada beberapa usulan kegiatan yang telah disetujui. Tetapi pihak ketiga dari Dinas Pelaksana Kegiatan, tidak lapor ke Kelurahan dan juga Ketua RT setempat, malah mencari lokasi pembangunan sendiri, sehingga menyebabkan pembangunan yang tidak tepat sasaran.

SIMPULAN

Manajemen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Spasial untuk Pembangunan yang Berkelanjutan Pada Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan cukup baik dilihat dari: *Pertama*, Perencanaan, Tujuan cukup baik karena untuk menyajikan data dan informasi spasial yang lengkap dan akurat, Anggaran sudah memadai yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Paringin Kota dengan melakukan Konsultasi dengan stakeholder terkait. *Kedua*, Pengorganisasian, Pembentukan Tim sudah baik karena sudah ada koordinasi antar bidang/lembaga, Pembagian kerja sudah baik dengan pembagian dari Mentor yang bertugas untuk mendukung dan membantu Project Leader. *Ketiga*, Pengarahan, pengarahan perencanaan cukup baik, karena sudah ada koordinasi, pelaksanaan kegiatan tim cukup baik dengan sistem pengumpulan usulan. *Keempat*, Pengkoordinasian, koordinasi kegiatan cukup baik dengan melakukan musyawarah rutin dengan tim dan masyarakat dan kerjasama cukup baik. *Kelima*, Pengawasan, monitoring cukup baik. Evaluasi cukup baik terhadap progres pembangunan. Faktor yang mempengaruhi terdiri dari; Faktor pendukung yaitu adanya dukungan adopsi/replikasi dari Manajemen perencanaan pembangunan. Faktor penghambat yaitu keterbatasan SDM dan tidak adanya koordinasi dengan Pihak ketiga pelaksana Kegiatan Pembangunan.

Agar Manajemen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Spasial untuk Pembangunan yang Berkelanjutan Pada Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan berjalan dengan maksimal maka disarankan kepada :

- a. Lurah Paringin Kota agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen perencanaan pembangunan agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan selanjutnya. Dan Manajemen perencanaan pembangunan ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara dan dikembangkan, disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Pemangku Kepentingan baik yang internal maupun eksternal yaitu Masyarakat, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, PUPRKIM, DINSOSPPAPEMDES dll, diharapkan bisa lebih menjalin komunikasi, seperti yang selama ini sudah terbangun. Sehingga ketika ada hambatan / permasalahan, bisa segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya.
- c. Kepada masyarakat diharapkan agar ikut serta dalam melakukan pengajuan usulan dan monitoring/pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Darmawan, D. 2014. *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Fayol, Henry. 2017. *Manajemen Public Relations, fungsi-fungsi manajemen*. Jakarta: PT. Elex Media

Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.

Khairinal. 2016. *Menyusun proposal skripsi, tesis, & disertasi*. Jambi: Salim

Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja.

Mustanir, A., & Abadi, P. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang*. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261.

Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,.

Suhardi. 2018. *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Gava Media.

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju

Sukmadinata, N. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.